

JSAP: Journal Syariah and Accounting Public
ISSN: 2622-3538
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index
Vol. 5, No. 1 Juli 2022
DOI: 10.31314/jsap.5.1.1-7.2022

EVALUASI SISTEM PENCATATAN AKUNTANSI PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI KABUPATEN GORONTALO

Felmi D. Lantowa[1], Ruwaida Ambela[2]
1. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia
2. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia
Email; felmilantowa@umgo.ac.id, ainambela@gmail.com

Info Artikel: Diterima: 10 April 2022, Disetujui: 26 Juni 2022, Publish 27 Juni 2022

Abstract:
This research aims to determine the accounting recording system at Village Owned Enterprises (BUMDes) in Gorontalo Regency and to determine the accounting standards used by BUMDes in Gorontalo Regency. This research uses descriptive qualitative research method using observation, interview and documentation techniques. Checking the validity of the data using triangulation with sources, triangulation with theory, triangulation with data. The results showed the financial reports presented by BUMDes in Gorontalo Regency were still simple and did not refer to the accounting standards of Micro, Small and Medium Entities (EMKM) as stated in the results of the performance report of the Provincial Financial Supervisory Agency (BPKP) in 2020 and the accounting recording system used is not in accordance with the stages of the proper accounting recording system thus the accounting recording system at BUMDes is not appropriate and meets applicable accounting standards.

Keywords: *Evaluation, Accounting Record System, Bumdes*

Abstrak:
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data menggunakan trianggulasi dengan sumber, trianggulasi dengan teori, trianggulasi dengan data. Hasil penelitian menunjukkan laporan keuangan yang disajikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Gorontalo masih bersifat sederhana dan belum mengacu pada standar akuntansi Entitas Mikro Kecil dan Menengah (EMKM) sebagaimana yang tertuang pada hasil laporan kinerja Badan Pengawas Keuangan Provinsi (BPKP) tahun 2020 dan system pencatatan akuntansi yang digunakan belum sesuai dengan tahapan-tahapan sistem pencatatan akuntansi yang semestinya sehingga sistem pencatatan akuntansi pada BUMDes belum sesuai dan memenuhi standar akuntansi yang berlaku.

Kata kunci : Evaluasi, sistem pencatatan akuntansi, BUMDes

PENDAHULUAN

Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mampu membuka peluang untuk desa menjadi lebih mandiri dan otonom. BUMDes Di Indonesia secara resmi berjalan dengan disahkan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang diatur dalam pasal 54 ayat 2 bahwa hal yang bersifat strategis sebagaimana diatur diantaranya adalah pembentukan BUMDes.

Perkembangan BUMDes di Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan sekarang sangat signifikan hal ini bisa dilihat dari data kementrian desa dimana BUMDes berkontribusi pada PADes yang semakin meningkat. Dari data kementrian desa mengenai kumulasi jumlah BUMDes di Indonesia sampai tahun 2020 terus meningkat dimana pada tahun 2014 atau sebelumnya sebanyak 8.189 BUMDes yang kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi 14.463 BUMDes selanjutnya terus mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebanyak 28.595 BUMDes, pada tahun 2017 mencapai angka 43.339 BUMDes dan pada tahun 2018 sebanyak 49.213 BUMDes kemudian pada tahun 2019 menjadi 51.091 BUMDes dan terus mengalami peningkatan hingga berjumlah 51.134 BUMDes pada tahun 2020. Hal ini tidak terlepas dari pengalokasian dana desa untuk modal BUMDes pada tahun 2015- 2020 yang mencapai Rp 4,2 triliun sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli desa diamana BUMDes telah berkontribusi sebesar Rp 1,1 triliun.

Dari hasil observasi awal yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gorontalo terdapat 191 BUMDes yang tersebar diseluruh wilayah desa maupun kelurahan yang ada di Kabupaten Gorontalo akan tetapi dari hasil laporan kinerja BPKP ditemukan bahwa dari jumlah BUMDes tersebut hanya terdapat tiga BUMDes yang mampu meyusun Laporan Keuangan. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1 berikut.

Tabel 1. BUMDes yang mampu meyusun Laporan Keuangan

No	Kabupaten	Nama Bumdes	Laporan Keuangan			
			Neraca/ LPK	Laba/Lap Hasil Usaha	Lap Arus Kas	Lap Perubahan Modal
1	Gorontalo	Anugrah	1	1	1	1
2	Gorontalo	Tunas Harapan	1	1	1	1
3	Gorontalo	Bina Usaha	1	1	1	1

Sumber : LKP BPKP Provinsi Gorontalo Tahun, 2020

Dari data di atas dijelaskan bahwa dari banyaknya BUMDes yang tersebar di Kabupaten Gorontalo hanya tiga BUMDes yang mampu menyusun Laporan Keuangan, jumlah ini tidak sebanding dengan total jumlah BUMDes yang ada sehingga menjadi perhatian didalam pengelolaan keuangan BUMDes sesuatu standar akuntansi yang dipersyaratkan.

Dan untuk menjadi sebuah BUMDes yang profesional harus memiliki landasan sistem pencatatan akuntansi yang akurat. Namun dalam pelaksanaannya BUMDes belum memiliki standar akuntansi yang dipersyaratkan secara umum digunakan. Hal ini sebagaimana hasil penelitian dari Rizqi (2019) yang meneliti tentang penyusunan laporan keuangan BUMDes berdasarkan SAK ETAP dan penelitian Ilham (2020) penerapan PSAK UMKM pada laporan keuangan BUMDes. Dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang "Evaluasi Sistem Pencatatan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kabupaten Gorontalo".

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena yang lain (Siyoto & Sodik, 2015:11).

Peneletian ini mengambil tempat atau lokasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gorontalo. Waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Maret sampai pada bulan April tahun 2022 dengan menyesuaikan waktu dari narasumber.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan kemudian menggunakan pengecekkan keabsahan data melalui trianggulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar akuntansi diperuntukkan sebagai acuan penyusunan laporan keuangan, yang didalamnya mengatur unsur laporan keuangan yang akan disajikan oleh suatu entitas. Dalam menyajikan laporan keuangan perlu melalui prosedur yang disebut dengan sistem pencatatan akuntansi, berdasarkan dari analisis penelitian penulis melihat pendapat peneliti terdahulu Notohatmodjo (2014) mengenai sistem pencatatan akuntansi dimana sistem adalah suatu kesatuan yang berisi komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain untuk memudahkan aliran informasi, materi dan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan. Sistem pencatatan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Pulungan (2017:3) bahwa sistem pencatatan akuntansi terdiri dari tahapantahapan (1) pengidentifikasian, (2) pencatatan, (3) penggolongan, (4) pengikthisaran, (5) penyusunan laporan.

Adapun yang mencangkup dalam kegiatan sistem pencatatan akuntansi menurut Pulungan (2017) sebagai berikut.

Pengidentifikasian

Berdasarkan sistem akuntansi menurut Pulungan (2017) pengindentifikasian adalah suatu proses yang dilakukan seorang accounting terhadap bukti transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan atau organisasi dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang transaksi tersebut agar accounting tidak salah menentukan akun sebelum di catat kedalam jurnal harian.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada BUMDes di Kabupaten Gorontalo, peneliti menemui bahwa BUMDes di Kabupaten Gorontalo sudah menggunakan bukti transaksi dalam operasional usaha. Menurut Ingga (2016) Data merupakan dokumen penting dalam penyusunan laporan keuangan. Sebelum dilakukan pencatatan (recording), semua data harus dikumpulkan terlebih dahulu, karena ada kemungkinan data yang dibutuhkan belum lengkap.

Kemudian sebagaimana hasil wawancara secara mendalam serta hasil analisa peneliti bahwa dalam melakukan pencatatan akuntansi BUMDes di Kabupaten Gorontalo telah menggunakan bukti transaksi disetiap aktivitas keuangan dan bukti transaksi yang digunakan sudah sesuai dengan transaksi yang terjadi. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Notohatmodjo (2014) yang menyatakan bahwa ketika terjadi suatu transaksi, harus ada bukti transaksi yang dapat menunjukkan kebenaran dari transaksi tersebut. Namun demikian BUMDes di Kabupaten Gorontalo belum ditunjang dengan sumber daya manusia atau pegawai yang faham akan sistem pencatatan keuangan dalam melakukan pencatatan keuangan.

Kemudian ditemukan bahwa sumber daya manusia yang kompeten dalam melakukan pencatatan akuntansi mempengaruhi sebuah sistem pencatatan akuntansi dimana sebuah BUMDes di Kabupaten Gorontalo apabila memiliki suatu pegawai yang kompeten maka laporan keuangannya juga lengkap sedangkan apabila seorang pegawai tidak kompeten didalamnya maka laporan keuangan yang disajikan masih sederhana. Terdapat dibeberapa BUMDes di Kabupaten Gorontalo yang sebelumnya sudah mampu dalam menyajikan laporan keuangan secara lengkap namun setelah pengurus BUMDes yang kompeten dalam penyajian keuangan tidak menjabat lagi hal ini berimbas pada laporan keuangan yang disajikan oleh BUMDes itu sendiri menjadi

informasi keuangan yang sifatnya masih sederhana.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengidentifikasian transaksi pada BUMDes di Kabupaten Gorontalo sudah sesuai dengan sistem pencatatan akuntansi dimana BUMDes di Kabupaten Gorontalo sudah menggunakan bukti transaksi dan bukti transaksi yang digunakan sudah disesuaikan dengan jenis transaksi yang terjadi namun dalam pengidentifikasian transaksi belum melibatkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang sistem pencatatan transaksi sehingga hal ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah maupun pengurus BUMDes.

Pencatatan

Berdasarkan penelitian Noto hatmodjo (2014) pencatatan transaksi dilakukan sesuai dengan urutan waktu atau kronologis. Pencatatan ini berguna untuk meringkas transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan, namun tidak menghilangkan informasi yang terkandung didalamnya. Dalam sistem akuntansi diberlakukan suatu aturan yang bertujuan untuk mengatur tata kelola keuangan suatu entitas yakni standar akuntansi.

Standar akuntansi adalah pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi didalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).

Melalui observasi awal diketahui bahwa hanya terdapat tiga BUMDes di Kabupaten Gorontalo yang telah menyajikan informasi keuangan hal ini ditandai dengan ketiga BUMDes tersebut telah memiliki laporan keuangan. Sementara itu, menurut Sari & Fitriastuti (2017) tujuan dari proses pencatatan untuk melakukan perekaman transaksi/aktivitas bisnis yang dilakukan sehingga peristiwa – peristiwa ekonomi yang terjadi dapat ditelusuri secara pasti.

Berdasarkan ungkapan diatas peniliti dapat menggambarkan hasil penelitian dengan mempertimbangkan penyataanpenyataan tersebut bahwa standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh BUMDes-BUMDes yang ada di kabupaten Gorontalo belum jelas. Faktanya BUMDes – BUMDes di Kabupaten Gorontalo masih merasa asing dengan sistem dan peraturan yang ada sekarang ini. Hal itu terbukti dengan BUMDes – BUMDes di Kabupaten Gorontalo belum mengetahui bahwa ada suatu peraturan yang dapat menjadi pedoman dalam pembuatan sistem

pencatatan akuntansi.

Dalam penelitian Rizqi (2019) Standar Akuntansi dapat melahirkan sebuah sistem pencatatan akuntansi sehingga penyusunan laporan keuangan haruslah mengikuti standar yang berlaku. Ketidak sesuaian penggolongan akun akan menyebabkan suatu laporan keuangan menjadi tidak relevan. Namun dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peniliti pada BUMDes-BUMDes yang ada di Kabupaten Gorontalo diketahui masih banyak BUMDes yang menyajikan laporan keuangan secara sederhana tanpa menggunakan sistem akuntansi yang tepat. Disamping itu, kepala bidang keuangan juga mengungkapkan bahwa PMD Kabupaten Gorontalo tidak mendalami secara seksama bagaimana penyajian informasi keuangan BUMDes-BUMDes yang ada di Kabupaten Gorontalo.

BUMDes di Kabupaten Gorontalo berjumlah 191 unit dari jumlah tersebut ditemukan hanya 3 unit BUMDes yang melakukan pencatatan keuangan berdasarkan sistem akuntansi hal ini juga berdasar atas hasil laporan kinerja BPKP tahun 2020 dan 152 diantaranya masih melakukan pencatatan dengan cara yang sederhana dimana BUMDesBUMDes tersebut belum menyajikan laporan keuangan dan hanya mencatat pengeluaran kas masuk dan kas keluar sementara itu 36 BUMDes lainnya hingga saat ini belum aktif dalam operasional.

Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam dikemukakan bahwa dalam penyajian laporan keuangan belum diketahui standar akuntansi yang seharusnya digunakan oleh BUMDes di Kabupaten Gorontalo. Selain itu, kepala bidang pemberdayaan masyarakat dinas PMD mengemukakan bahwa hingga saat ini BUMDes di Kabupaten Gorontalo masih menggunakan sistem pencatatan secara sederhana sedangkan dalam PP Nomor 11 BUMDes diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban. BUMDes yang sudah melakukan pencatatan akuntansi secara lengkap diketahui adalah BUMDes yang memiliki pengurus yang faham akan pencatatan akuntansi bahkan salah satu direktur BUMDes telah belajar secara otodidak dalam melakukan pencatatan akuntansi guna untuk memudahkannya dalam mempertanggungjawabkan keuangan BUMDes tersebut.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rizqi (2019) dimana hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam pencatatan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes berdasarkan standar akuntansi yakni SAK-

ETAP. Hal serupa juga diungkapkan pada hasil penelitian Ilham (2020) bahwa laporan keuangan BUMDes pada setiap jenis-jenis usaha yang dibangun terlihat bahwa pola pengelola keuangan masih minim karena bagian administrasi belum mencatatnya sesuai dengan SAK EMKM. Menurut IAI laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP terdiri dari Neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian laporan keuangan berdasarkan SAK-EMKM terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi selama periode, catatan atas laporan keuangan. Sementara itu, laporan keuangan berdasarkan SAP terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, laporan Operasional, laporan Arus Kas, laporan Perubahan Ekuitas dan catatan atas Laporan Keuangan. Kemudian dalam penelitian Lantowa & Sako (2018) menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan sehingga hal ini menunjukkan bahwa penerapan SAP yang efektif akan semakin meninggkatkan kualitas laporan keuangan. Sedangkan dalam laporan kinerja perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo tahun 2020 menyatakan bahwa sesuai SAK-EMKM, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Modal tidak wajib dibuat oleh entitas Mikro Kecil dan Menengah, seperti yang terdapat pada tabel berikut.

Dari uraian di atas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pencatatan pada BUMDes di Kabupaten Gorontalo sudah diupayakan oleh pengurus BUMDes tetapi masih perlu adanya aturan berupa standar akuntansi yang jelas yang ditetapkan oleh pemerintah khusus pengelolaan BUMDes di Kabupaten Gorontalo untuk digunakan sebagai acuan dalam menyajikan informasi keuangan.

Penggolongan

Penggolongan berdasarkan sistem informasi menurut Pulungan (2017) adalah suatu proses pengelompokan transaksi transaksi dalam suatu periode kedalam suatu akun tertentu, penggolongan ini sering di sebut dengan istilah Buku Besar.

Berdasarkan observasi awal penggolongan transaksi pada BUMDes di Kabupaten Gorontalo belum nampak secara jelas karena BUMDes di Kabupaten Gorontalo masih menggunakan pencatatan sederhana.

Setelah dilakukan penelitian secara mendalam diketahui bahwa BUMDes di Kabupaten Gorontalo masih menyajikan laporan keuangan secara sederhana dan

ketika melakukan penggolongan transaksitransaksi juga masih bersifat sederhana dimana penggolongan tidak secara keseluruhan transaksi hanya pada item-item tertentu seperti pada penggolongan transaksi pengeluaran dan pendapatan tidak disertakan lebih lanjut mengenai pengeluaran misalnya dari sisi beban ataupun pendapatan dari sisi penjualan, selain itu penggolongan transaksi belum dicatat dalam buku besar. Sedangkan menurut Sari & Fitriastuti (2017) menyatakan bahwa penggolongan adalah proses pengelompokan setiap transaksi/aktivitas bisnis yang dicatat pada proses sebelumnya ke dalam kelompok akun yang sejenis. Tujuan dari proses ini adalah; (a) dapat diketahui secara pasti dan rinci mengenai kondisi masing-masing akun terutama dalam hal saldo dan frekuensi mutasinya, (b) memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Notohatmodjo (2014) Buku besar dibuat untuk setiap akun-akun yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi perusahaan. Buku besar ini bermanfaat untuk mencatat transaksi keuangan secara mendetail dari setiap akun yang ada pada periode tertentu juga untuk mengetahui seberapa besar saldo dari masing masing transaksi yang telah dilakukan.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tahapan penggolongan transaksi pada BUMDes di Kabupaten Gorontalo belum sesuai dengan sistem pencatatan akuntansi dimana penggolongan belum dituangkan dalam buku besar dan belum disajikan secara rinci pada setiap akun-akun yang mengakibatkan saldo setiap akun belum dapat diketahui secara jelas. Dalam buku Ingga (2016) buku besar adalah format yang disediakan untuk mencatat semua jumlah yang terdapat dalam jurnal. Jumlah yang terdapat pada sisi debet jurnal dicatat pada buku besar sebelah debet, demikian juga jumlah yang berada disisi kredit jurnal dicatat pada buku besar sebelah kredit.

Pengikthisaran

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Notohatmodjo (2014) pada Akhir periode akuntansi terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pencatatan transaksi-transaksi selama satu periode (biasanya pada akhir bulan atau akhir tahun pencatatan), dan penyusunan laporan keuangan. Kedua aktivitas ini berkaitan satu sama lain. Aktivitas pencatatan transaksi-transaksi selama satu periode memberikan gambaran mengenai bagaimana kegiatan ekonomi perusahaan selama satu periode tersebut.

Dari hasil observasi awal peneliti melihat bahwa informasi keuangan yang

disajikan oleh BUMDes di Kabupaten Gorontalo masih bersifat sederhana sehingga tahap pengikhtisaran belum dapat diketahui apakah telah diterapkan dalam penyajian informasi keuangan.

Setelah dilakukan wawancara mendalam dan dianalisa oleh peneliti ditemukan bahwa pada tahap pengikhtisaran BUMDes di Kabupaten Gorontalo sudah menggunakan catatan keuangan yang lebih dari satu periode akuntansi dan apabila terdapat transaksi keuangan yang terlewati maka dicatat kembali sehingga dapat disimpulkan hal ini belum sesuai dengan sistem pencatatan akuntansi yang seharunya dimana alur pencatatan keuangan sudah berdasarkan tahapan-tahapan dan apabila terdapat transaksi yang terlewati maka yang dilakukan adalah membuat ayat jurnal penyesuaian. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pulungan (2019) pada tahapan pengikhtisaran meliputi: (a) Penyusunan Neraca Saldo, (b) Penyesuaian terhadap akun-akun tertentu, (c) Penyusunan Neraca Lajur. Juga sejalan dengan pernyataan Ingga (2016) bahwa tahap pembuatan neraca lajur adalah neraca yang terdiri dari beberapa lajur. Lajur tersebut meliputi lajur: Neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, Laba rugi, dan neraca.

Penyusunan Laporan

Menurut Notohatmodjo (2014) dalam penelitiannya dikemukakan bahwa aktivitas penyusunan laporan keuangan terdiri dari empat macam, laporan labarugi, neraca atau laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Laporan-laporan tersebut memiliki kegunaan masing-masing karena dalam sistem pencatatan akuntansi kegiatan yang paling penting adalah penyusunan laporan hal ini dikarenakan penyusunan laporan merupakan bentuk pertanggung jawaban yang wajib dilakukan oleh suatu entitas.

Berdasarkan observasi awal pada BUMDes di Kabupaten Gorontalo yang telah menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi hanya terdapat tiga BUMDes dari banyaknya BUMDes yang tersebar disetiap wilayah Kabupaten Gorontalo. Unsur laporan keuangan menurut Ingga (2016) yakni laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Setelah dilakukan penelitian diketahui bahwa penyusunan laporan pada BUMDes di Kabupaten Gorontalo sejauh ini masih sederhana dimana hanya terdapat tiga BUMDes yang telah menyajikan laporan keuangan sementara sebagian besar lainnya belum melakukan

penyusunan laporan keuangan. Hal ini juga dipengaruhi oleh masih kurangnya pelatihan pembuatan laporan keuangan untuk BUMDes di Kabupaten Gorontalo. sejauh ini, pelatihan-pelatihan yang dilakukan masih pelatihan penyajian informasi keuangan secara sederhana sehingga unsur laporan keuangan yang seharusnya disajikan oleh BUMDes di Kabupaten Gorontalo belum terealisasi meskipun demikian berdasarkan wanwancara yang dilakukan berbagai pihak berpendapat bahwa memang sudah seharunya setiap transaksi keuangan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sari & Fitriastuti (2017) yang menyatakan bahwa proses pelaporan merupakan keluaran yang dihasilkan dari suatu proses akuntansi. Laporan keuangan menggambarkan posisi keuangan entitas, aktivitas ekonomi entitas, dan perubahan modal (ekuitas) yang dimiliki oleh suatu entitas. Kemudian dalam penelitian yang telah dilakukan oleh rizqi (2019) dimana laporan yang dibuat oleh BUMDes juga tidak dapat menggambarkan posisi atau keadaan usaha BUMDes sebenarnya dan tidak dapat dibandingkan karena kesalahan penyusunan bentuk laporan keuangan, tidak dibuatnya laporan laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan CALK.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyajian laporan keuangan pada BUMDes di Kabupaten Gorontalo belum berdasarkan standar akuntansi keuangan dan belum melalui proses pembuatan laporan keuangan berdasarkan sistem pencatatan akuntansi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya tentang evaluasi sistem pencatatan akuntansi pada BUMDes di Kabupaten Gorontalo menggunakan acuan sistem pencatatan akuntansi menurut Pulungan (2017), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Pengidentifikasian, pada tahapan pengidentifikasian sudah sesuai dengan sistem pencatatan akuntansi dimana BUMDes di Kabupaten Gorontalo sudah menggunakan bukti transaksi dan bukti transaksi yang digunakan sudah disesuaikan dengan jenis transaksi yang terjadi.

Pencatatan pada BUMDes di Kabupaten Gorontalo masih dilakukan secara sederhana meskipun demikian pencatatan sudah diupayakan oleh pengurus BUMDes tetapi masih perlu adanya aturan berupa standar akuntansi yang jelas yang ditetapkan oleh pemerintah khusus pengelolaan BUMDes di Kabupaten

Gorontalo untuk digunakan sebagai acuan dalam menyajikan informasi keuangan.

Tahapan penggolongan transaksi pada BUMDes di Kabupaten Gorontalo belum sesuai dengan sistem pencatatan akuntansi dimana penggolongan belum dituangkan dalam buku besar dan belum disajikan secara rinci pada setiap akun-akun yang mengakibatkan saldo setiap akun belum dapat diketahui secara jelas.

Pengikhtisaran, pada tahap ini transaksi pada BUMDes di Kabupaten Gorontalo yang terlewati belum dicatat pada jurnal penyesuaian sehingga belum diketahui secara pasti berapa nilai harta, hutang, modal, pendapatan serta beban dalam operasional usaha.

Penyusunan laporan yang disajikan oleh BUMDes di Kabupaten Gorontalo belum mengacu pada standar akuntansi EMKM sebagaimana yang tertuang pada hasil laporan kinerja BPKP tahun 2020. Hal ini dibuktikan dengan penyajian laporan yang masih sederhana juga ditandai dengan terdapat beberapa BUMDes di Kabupaten Gorontalo yang menggunakan SAK-ETAP sebagai acuan penyusunan laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Ingga, I. (2016). *Teori Akutansi Dan Implementasi.* Yogyakarta: Indomedia Pustaka, pp: 16-79.

Pulungan, S. H. (2017). *Cara Menyusun Laporan Keuangan.*Bandar Lampung: Institut Informatika dan Bisnis Damajaya, p: 3.

Sari, D. M. and Fitriastuti, T. (2017). *Dasar akuntansi pemahaman konsep dan praktek.* Kalimantan Timur : Mulawarman University Press, pp: 1-5.

Siyoto, S. and Sodik, A. (ed). (2015). *Dasar Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Literasi Media Publishing, pp: 11-100.

Wekke, I.S., dkk,. (2019). *Metode Penelitian Sosial.* Yogyakarta: Gawe Buku, p: 35.

Ilham. (2020). Penerapan PSAK UMKM pada laporankeuangan badan usaha milik desa (bumdes) harapan kec ternate riaja kab barru. Universitas MuhammadiyahBisnis. Skripsi.

Lantowa, F. D. and Sako, U. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Universitas Muhammadiyah Gorontalo.*Journal Of AccountingScience,* 2(1), 43-54.

Notohatmodjo, T. S. (2014). Evaluasi terhadap sistem pencatatan akuntansi pada usaha mikro,kecil dan menengah. Semarang. Universitas Dipeonegoro. Skripsi.

Rizqi, P. A. (2019). Penyusunan laporan keuangan BUMDes berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas public (SAK ETAP). Universitas Semarang. Skripsi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Desa.

BPKP. (2021). Laporan Kinerja. (pada https://www.bpkp.go.id/). Diakses 3 Maret 2022.

IAI. (2021). Standar Akuntansi Keuangan. (pada http://iaiglobal.or.id). Diakses 9 Maret 2022.

Kemendes. (2021). Kumulasi Jumlah Bumdes. (pada https://www.kemendesa.go.id/). Diakses 3 Maret 2022.

Komite, SAP. (2021). Standar Akuntansi Pemerintah. (pada http://ksap.org). Diakses 8 Maret 2022.